

[SNP – 42]

# Kedaulatan Indonesia dalam Ancaman Konflik di Laut China Selatan: Analisis Strategi Komunikasi Krisis

Anggraeni Eka Lestari<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Magister Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Al-azhar Indonesia,  
Jl.Sisingamangaraja, Jakarta Selatan, 12110

Penulis untuk Korespondensi/E-mail: [anggraeni.ekalestari@gmail.com](mailto:anggraeni.ekalestari@gmail.com)

**Abstract** - Indonesia's sovereignty faces serious threats due to the ongoing conflict in the South China Sea, involving overlapping claims from several countries. This conflict not only affects regional stability but also poses significant risks to Indonesia's territorial integrity and national security. This research addresses serious threats to Indonesia's sovereignty in the South China Sea, a region that is one of the most strategic and busy waterways in the world. The conflict in this area is triggered by overlapping claims from several countries, including China, Vietnam, the Philippines, Malaysia, and Brunei. This situation poses significant risks to Indonesia's territorial integrity, especially in the Natuna waters bordering Indonesia's Exclusive Economic Zone (EEZ). The study aims to analyze the application of crisis management and crisis communication strategies to maintain sovereignty and manage potential conflicts threatening Indonesia's national security. Using a qualitative approach with case studies, data were collected through in-depth interviews and secondary literature. The findings indicate that a comprehensive crisis management strategy is essential, including enhancing military capacity, international cooperation, and transparent crisis communication to ensure national stability. This research contributes both theoretically and practically by providing strategic recommendations for policymakers in Indonesia to improve readiness and response to conflict threats in the region.

**Keywords** - Crisis Management, Crisis Communication, South China Sea, Indonesia Sovereignty, Regional Stability.

**Abstrak** - Kedaulatan Indonesia menghadapi ancaman serius akibat konflik yang berkembang di Laut China Selatan, yang melibatkan berbagai klaim tumpang tindih dari beberapa negara. Konflik ini tidak hanya mempengaruhi stabilitas regional tetapi juga menimbulkan risiko signifikan terhadap integritas teritorial dan keamanan nasional Indonesia. Penelitian ini membahas ancaman terhadap kedaulatan Indonesia di Laut China Selatan yang disebabkan oleh klaim tumpang tindih dari beberapa negara. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis penerapan strategi manajemen dan komunikasi krisis dalam menghadapi konflik tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus, mengumpulkan data primer melalui wawancara mendalam dan data sekunder dari literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi manajemen krisis yang komprehensif diperlukan, mencakup peningkatan kapasitas militer, kerjasama internasional, dan komunikasi krisis yang transparan untuk menjaga stabilitas nasional. Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan di Indonesia untuk meningkatkan kesiapan dan respons terhadap ancaman di Laut China Selatan.

**Kata Kunci** - Manajemen Krisis, Komunikasi Krisis, Laut China Selatan, Kedaulatan Indonesia, Stabilitas Regional.

## PENDAHULUAN

Indonesia menghadapi ancaman serius terkait kedaulatannya di Laut China Selatan, kawasan yang menjadi salah satu jalur perairan paling strategis dan sibuk di dunia. Konflik di kawasan ini dipicu oleh klaim tumpang tindih dari beberapa negara, termasuk China, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei. Selain mengganggu stabilitas regional, situasi ini menimbulkan risiko besar terhadap integritas teritorial Indonesia, khususnya di wilayah perairan Natuna yang berbatasan dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Dalam konteks ancaman ini, manajemen krisis dan komunikasi krisis menjadi elemen penting untuk mempertahankan kedaulatan serta mengelola potensi konflik yang dapat mengancam keamanan nasional Indonesia.

Dalam studi ini, dua pendekatan teoretis menjadi landasan utama. Pertama, *Situational Crisis Communication Theory* (SCCT) yang dikembangkan oleh W. Timothy Coombs, memberikan kerangka untuk memahami dan merancang strategi komunikasi krisis berdasarkan jenis ancaman dan persepsi publik terhadap krisis tersebut. Pendekatan ini menekankan pentingnya respons komunikasi yang tepat untuk memitigasi risiko reputasi dan menjaga kepercayaan publik selama masa krisis [1]. Kedua, pendekatan *Cultural Approach to Organizations* yang dikembangkan oleh Sellnow dan Seeger digunakan untuk menganalisis peran budaya organisasi dan pola komunikasi dalam pengelolaan krisis di lingkungan maritim Indonesia. Pendekatan ini memberikan wawasan mengenai bagaimana nilai-nilai budaya, struktur organisasi, dan narasi kolektif dapat memengaruhi strategi manajemen krisis yang diambil [2].

Penelitian sebelumnya menunjukkan pentingnya peran manajemen dan komunikasi krisis dalam mengatasi konflik wilayah maritim. Fearn-Banks menggarisbawahi perlunya manajemen krisis yang mencakup langkah-langkah preventif dan responsif guna mengatasi insiden yang berpotensi mengganggu stabilitas dan keamanan negara [3]. Sementara itu, Coombs menekankan bahwa komunikasi krisis berperan penting dalam menjaga kepercayaan publik dengan memberikan informasi yang jelas dan konsisten selama masa krisis [4].

Di sisi lain, konflik Laut China Selatan memiliki dampak serius terhadap keamanan maritim Indonesia, seperti peningkatan anggaran pertahanan, ketidakpastian perdagangan, dan stabilitas politik.

Selain itu, Indonesia juga menghadapi tantangan berupa ancaman isu-isu terorisme, perompakan, *illegal fishing* dan kriminal transnasional. Untuk menghadapi tantangan tersebut, Indonesia perlu memperkuat strategi pertahanan maritim Indonesia, yang mencakup kebijakan diplomasi, peningkatan kemampuan militer, dan kerja sama regional. [5]

Oleh karena itu, manajemen krisis harus mencakup upaya mitigasi risiko ekonomi dan perlindungan jalur perdagangan maritim yang esensial. Selain itu, konflik di Laut China Selatan juga berdampak negatif terhadap ekosistem laut dan kehidupan masyarakat pesisir. Penangkapan ikan ilegal dan pembangunan pulau buatan merusak ekosistem laut yang mengancam mata pencaharian nelayan lokal [6].

Penelitian mengenai manajemen krisis di wilayah maritim telah banyak dilakukan, namun terbatasnya kajian komprehensif yang secara spesifik membahas penerapan strategi manajemen dan komunikasi krisis dalam konteks ancaman terhadap kedaulatan Indonesia di Laut China Selatan. Artikel ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menawarkan pendekatan yang fokus pada strategi manajemen krisis dalam menjaga kedaulatan Indonesia serta menghindari eskalasi konflik secara efektif. Oleh karena itu, kajian ini tidak hanya menambah wawasan teoretis mengenai manajemen krisis, tetapi juga memberikan kontribusi praktis untuk mempertahankan stabilitas dan keamanan nasional Indonesia.

Penelitian ini berfokus pada beberapa permasalahan utama, yaitu bagaimana penerapan manajemen krisis dalam menghadapi ancaman di Laut China Selatan dan bagaimana komunikasi krisis dapat mendukung strategi manajemen krisis yang efektif. Untuk menjawab permasalahan ini, artikel ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif yang menitikberatkan pada kajian literatur dari berbagai sumber relevan guna mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang strategi manajemen krisis di wilayah maritim. Pendekatan ini diharapkan dapat mengidentifikasi strategi-strategi yang relevan bagi Indonesia dalam mengelola ancaman dan mempertahankan kedaulatannya di kawasan tersebut.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik dari sisi teoretis maupun praktis. Dari sisi teoretis, penelitian ini memperkaya literatur mengenai penerapan teori manajemen krisis dan komunikasi krisis di ranah maritim, terutama dalam

konteks konflik Laut China Selatan. Dari sisi praktis, penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi strategis bagi para pembuat kebijakan di Indonesia agar mampu meningkatkan kesiapan dan respons dalam menghadapi ancaman konflik di kawasan tersebut. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi upaya pemerintah Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayah, meningkatkan keamanan nasional, dan memastikan stabilitas regional.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami secara mendalam konflik di Laut China Selatan. Pendekatan studi kasus dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena yang kompleks dan kontekstual, khususnya dalam mengidentifikasi dan memahami strategi manajemen serta komunikasi krisis yang relevan dalam konteks ancaman terhadap kedaulatan Indonesia. Penelitian ini dirancang untuk mengamati respons Indonesia terhadap konflik tersebut dan bagaimana strategi komunikasi serta manajemen krisis dapat mendukung upaya mempertahankan stabilitas di wilayah yang dipersengketakan.

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data dari dua sumber utama: data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai narasumber, termasuk ahli kebijakan maritim, pejabat pemerintah, serta pakar komunikasi krisis. Pengumpulan data juga melibatkan data sekunder yang mencakup literatur, laporan pemerintah, dan artikel jurnal yang relevan. Data sekunder ini berguna untuk memberikan konteks yang lebih luas, menambah kedalaman, serta memperkuat analisis yang dihasilkan dari data primer.

Prosedur pengumpulan data dimulai dengan identifikasi narasumber yang berpengalaman dan kompeten di bidang kebijakan maritim dan komunikasi krisis. Salah satu narasumber utama yang dilibatkan adalah Kolonel Inf Iskandar, S.H., M.Han., yang merupakan Widyaiswara Madya di Pusdiklat Kementerian Pertahanan, dengan keahlian dan wawasan yang mendalam terkait isu-isu strategis pertahanan dan maritim. Wawancara dilakukan dengan panduan semi-terstruktur untuk memastikan fleksibilitas dalam mengeksplorasi topik secara menyeluruh. Selain wawancara, penelitian ini juga melibatkan analisis dokumen dan

konten dari berbagai literatur yang terkait dengan isu Laut China Selatan, laporan pemerintah, serta jurnal akademis. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memperkaya hasil dari wawancara, sekaligus menyediakan perspektif yang lebih menyeluruh terhadap konteks permasalahan.

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Analisis tematik dipilih untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan tema yang berkaitan dengan strategi manajemen krisis dan komunikasi krisis. Proses analisis meliputi beberapa tahap, termasuk membaca berulang kali data yang telah dikumpulkan dan mengidentifikasi tema-tema utama. Setelah tema utama diidentifikasi, dilakukan pemetaan strategi untuk memberikan gambaran yang lebih terstruktur mengenai langkah-langkah yang dapat diambil Indonesia dalam menghadapi ancaman di Laut China Selatan.

Dalam memastikan kualitas dan validitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber, dengan membandingkan data dari wawancara dengan informasi yang diperoleh dari dokumen dan literatur yang relevan. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana strategi manajemen krisis dan komunikasi krisis dapat diterapkan oleh Indonesia dalam menghadapi ancaman konflik di Laut China Selatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik di Laut China Selatan menarik perhatian dunia karena keterlibatan beberapa negara dalam klaim tumpang tindih atas wilayah maritim strategis ini, termasuk China, Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Indonesia. Konflik ini tidak hanya berdampak pada hubungan diplomatik antar negara tetapi juga menimbulkan konsekuensi ekonomi dan lingkungan yang signifikan. Eksplorasi sumber daya alam, peningkatan aktivitas militer, dan pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut berpotensi meningkatkan ketegangan dan bahkan risiko konflik bersenjata, yang mengancam stabilitas di perairan Natuna dan kedaulatan wilayah Indonesia.

Indonesia perlu mengadopsi strategi manajemen krisis yang komprehensif untuk menghadapi ancaman ini. Strategi tersebut harus mencakup peningkatan kapasitas militer, kerjasama internasional, dan diplomasi maritim yang kuat untuk menjaga kedaulatan dan keamanan nasional

[7]. Selain itu, komunikasi krisis yang transparan dan efektif dengan masyarakat dan negara-negara tetangga sangat penting untuk mencegah eskalasi konflik dan menjaga stabilitas regional. Melalui pendekatan yang sistematis dan terkoordinasi dalam manajemen krisis dan komunikasi krisis, Indonesia dapat menghadapi ancaman konflik di Laut China Selatan dengan lebih efektif, menjaga kedaulatannya, dan memastikan stabilitas regional yang berkelanjutan.

Berdasarkan perspektif manajemen krisis, pendekatan *Cultural Approach to Organizations* yang dikembangkan oleh Sellnow dan Seeger memberikan wawasan penting dalam mengelola krisis dengan memperhatikan konteks budaya[2]. Teori ini menekankan pentingnya membangun hubungan kepercayaan antara pemerintah, masyarakat, dan media dalam situasi krisis. Dalam konteks konflik di Laut China Selatan, pemerintah Indonesia perlu membangun kredibilitas dan mengomunikasikan informasi secara akurat dan transparan agar masyarakat mendapatkan gambaran yang tepat terkait situasi yang berkembang.

Penting pula untuk memanfaatkan peran media dalam membentuk opini publik dan mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul dari konflik ini. Selain itu, kerjasama multilateral dengan negara-negara terkait dan lembaga internasional menjadi langkah krusial dalam menyelesaikan konflik melalui jalur damai sesuai hukum internasional, sekaligus mempertahankan kedaulatan Indonesia.

Pendekatan lainnya yang relevan adalah *Situational Crisis Communication Theory* (SCCT) dari W. Timothy Coombs, yang menekankan pentingnya strategi komunikasi krisis yang sesuai dengan jenis krisis dan tanggapan publik[1]. Dalam konteks ini, SCCT menyoroti perlunya memilih strategi yang tepat berdasarkan tingkat ancaman reputasi dan atribusi tanggung jawab yang dirasakan publik terhadap krisis. Terdapat empat jenis krisis dalam teori ini, yaitu korban, kecelakaan, dapat dicegah, dan disengaja.

Berdasarkan teori ini, pemerintah Indonesia dapat menggunakan strategi komunikasi yang defensif untuk mempertahankan posisinya, dengan menekankan bahwa konflik ini dipicu oleh klaim sepihak pihak lain dan bukan akibat tindakan Indonesia. Strategi ini akan membantu menjaga reputasi Indonesia dan memperjelas posisinya di mata internasional, terutama dalam

mengkomunikasikan tindakan pencegahan yang diambil untuk mengurangi dampak konflik.

Berdasarkan hasil analisis, strategi manajemen krisis yang tepat bagi Indonesia meliputi langkah-langkah pencegahan, respons, dan pemulihan yang terstruktur. Pertama, identifikasi krisis dilakukan dengan mengenali konflik Laut China Selatan sebagai ancaman eksternal yang berada di luar kendali langsung Indonesia, namun memerlukan tanggapan proaktif untuk melindungi kedaulatan. Selain itu, evaluasi tanggung jawab publik terhadap krisis akan menentukan strategi komunikasi defensif dan mitigasi risiko, sehingga dapat meminimalisasi dampak negatif. Peningkatan patroli maritim, diplomasi aktif, dan penguatan kapasitas militer menjadi bagian dari strategi manajemen krisis yang diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi konflik ini.

Dalam mendukung strategi manajemen krisis, panduan komunikasi krisis yang efektif diperlukan, termasuk strategi deny atau penyangkalan yang menegaskan posisi Indonesia bahwa konflik ini dipicu oleh klaim negara lain. Selain itu, strategi diminish atau pengurangan dampak juga penting, dengan menyoroti langkah preventif yang telah diambil, seperti peningkatan patroli maritim dan kerjasama internasional. Di sisi lain, rebuild strategy atau strategi pemulihan akan memperlihatkan komitmen Indonesia dalam meningkatkan keamanan maritim dan transparansi dalam penegakan hukum di laut, yang akan membangun kepercayaan publik dan internasional.

Berdasarkan segi kebijakan, strategi komunikasi krisis dan manajemen pertahanan nasional memegang peranan kunci dalam menjaga kedaulatan Indonesia. Dukungan terhadap strategi ini juga dikuatkan melalui Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakum Hanneg) 2025-2029, yang menjadi acuan dalam perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan sistem pertahanan negara. Kebijakan ini menekankan sinergi antara sistem pertahanan militer dan nirmiliter dalam menghadapi berbagai jenis ancaman, termasuk ancaman hibrida seperti klaim teritorial di Laut China Selatan.

Jakum Hanneg juga menggarisbawahi pentingnya pemanfaatan sumber daya nasional secara terukur dan profesional untuk menangani ancaman secara cepat dan sistematis[8]. Pendekatan ini relevan dalam mengintegrasikan strategi komunikasi krisis dengan kerangka kebijakan nasional untuk

memastikan stabilitas keamanan dan kedaulatan wilayah Indonesia[9]. Selain itu, meningkatnya ketegangan di Laut China Selatan mendorong perlunya kerjasama strategis antara negara-negara ASEAN untuk memperkuat pengawasan dan kontrol di perairan yang disengketakan.

Pendekatan multilateral, seperti dialog *Quadrilateral Security dan inisiatif Code of Conduct (COC)*, menjadi langkah penting dalam membangun stabilitas kawasan[10]. Selain itu, pentingnya penguatan patroli maritim oleh negara-negara pesisir Laut China Selatan, termasuk Indonesia. Patroli bersama dengan dukungan teknologi pengawasan canggih dinilai efektif dalam mencegah pelanggaran wilayah dan memastikan keamanan jalur perdagangan[11].

Penelitian ini menyarankan pentingnya peningkatan kapasitas manajemen dan komunikasi krisis. Pemerintah perlu mengembangkan pelatihan khusus untuk personel yang menangani krisis maritim, meningkatkan koordinasi antar lembaga yang relevan, serta berinvestasi dalam infrastruktur yang mendukung pemantauan dan komunikasi darurat. Dengan kebijakan yang responsif dan strategi yang efektif, Indonesia diharapkan dapat mengelola konflik di Laut China Selatan secara komprehensif, mempertahankan kedaulatannya, dan menjamin stabilitas regional yang berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa Indonesia perlu menerapkan strategi manajemen dan komunikasi krisis yang efektif untuk menghadapi ancaman terhadap kedaulatan di Laut China Selatan. Konflik yang dipicu oleh klaim tumpang tindih dari beberapa negara, termasuk China dan Vietnam, berpotensi merusak integritas teritorial Indonesia, terutama di wilayah Natuna. Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan komprehensif yang mencakup peningkatan kapasitas militer, kerjasama internasional, dan komunikasi yang transparan sangat penting untuk menjaga stabilitas nasional. Selain itu, strategi yang melibatkan langkah-langkah pencegahan dan responsif dapat membantu Indonesia mengelola konflik dengan lebih baik. Rekomendasi kebijakan mencakup pelatihan khusus bagi personel krisis maritim dan peningkatan koordinasi antar lembaga terkait. Dengan implementasi strategi ini, diharapkan Indonesia dapat mempertahankan kedaulatan dan memastikan keamanan regional yang berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Coombs WT. Situational Crisis Communication Theory (SCCT). *The Handbook of Crisis Communication*, 2022, p. 193–204. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/9781119678953.ch14>.
- [2] Sellnow TL, Seeger MW. *Theorizing Crisis Communication*. Wiley; 2013.
- [3] Fearn-Banks K. *Crisis Communications: A Casebook Approach*. Taylor & Francis; 2016.
- [4] Coombs WT. *Ongoing Crisis Communication: Planning, Managing, and Responding*. SAGE Publications; 2011.
- [5] Sunoto SP, Fahrani AA, Napang M. Dampak Sekuritisasi Konflik Laut Cina Selatan terhadap Keamanan Maritim Indonesia. *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional* 2023;6. <https://doi.org/10.7454/jkskn.v6i2.10084>.
- [6] Nguyen H-KT. Mapping a decade of disputant and non-disputant behaviors in the South China Sea dispute. *Mar Policy* 2024;165:106189. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.marpol.2024.106189>.
- [7] Sukma R, Muhibat SF, Alexandra LA, Intan R. *The Future of The Seas in East Asia: Toward a Comprehensive Maritime Cooperation*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies 2015.
- [8] Kementerian Pertahanan. *Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2025-2029*. Jakarta: 2024.
- [9] Trung NT. *China's Plan for the South China Sea: A Mixture of Pressure and Legal Approaches 2021*. [https://amti.csis.org/chinas-plan-for-the-south-china-sea-a-mixture-of-pressure-and-legal-approaches/?utm\\_source=chatgpt.com](https://amti.csis.org/chinas-plan-for-the-south-china-sea-a-mixture-of-pressure-and-legal-approaches/?utm_source=chatgpt.com) (accessed January 9, 2025).
- [10] Duong H. *A Fair and Effective Code of Conduct for the South China Sea*. [https://AmtiCsisOrg/a-Fair-and-Effective-Code-of-Conduct-for-the-South-China-Sea/?Utm\\_source=chatgptCom](https://AmtiCsisOrg/a-Fair-and-Effective-Code-of-Conduct-for-the-South-China-Sea/?Utm_source=chatgptCom) 2015.
- [11] Asia Maritime Transparency Initiative. *Control by Patrol: The China Coast Guard in 2023*. [https://AmtiCsisOrg/Control-by-Patrol-the-China-Coast-Guard-in-2023/?Utm\\_source=chatgptCom](https://AmtiCsisOrg/Control-by-Patrol-the-China-Coast-Guard-in-2023/?Utm_source=chatgptCom) 202

